

**DIASPORA SUKU BUGIS DAN TERBENTUKNYA IDENTITAS TO-UGI'
DI WILAYAH TANAH BUMBU,
RESIDENSI BORNEO BAGIAN SELATAN DAN TIMUR, TAHUN 1900-1942**

**Oleh: Mansyur
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Lambung Mangkurat**

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the Bugis diaspora to the southeastern part of Borneo and its contribution to the formation of the so called to-Ugi ' identity during the period 1900-1942. The issues to be examined includes the relationship between the Bugis diaspora and the identity formation of to Ugi' especially in Tanah Bumbu region, Residency of Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo in during 1900-1942. Besides, this research also tries to answer of why the Bugis people could maintain its identity in the interaction with other tribes in the area of the Tanah Bumbu in 1900-1942. This study found that there are two stages to the Bugis diaspora in Borneo (Kalimantan) region. The first phase occurred after the fall of Makassar by the VOC in 1669. Diaspora was pioneered by the prince and some of his followers who were also descendants of the nobility. In addition to political factors, the diaspora was also motivated by Bugispeopleinstinctivelywander or somepe'.The second phase of diaspora occurred in the early of 1900s. It closely linked with the expansion of Dutch colonial rule in South Sulawesi. Then the economic factors, namely to find more areas of potential in the field of fisheries, agriculture and plantations. This causes the formation of diaspora identity to Ugi' the emergence of kampoeng-kampoeng Boegis, mappanretasi' ceremony, "boat building industry" in Kampoeng Pedjala, social mobility among the to-maradeka into the economic elite, patron-client relationship of Buginese or ajjoareng-joa, and the solidarity of the Bugisnese or pesse'.

Keywords: diaspora, identity, patron-client relationship.

I. PENDAHULUAN

Diaspora dan migrasi adalah sebuah fenomena yang banyak dijumpai dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.¹ Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sejarah diaspora di kepulauan Indonesia adalah diaspora suku bangsa Bugis di Nusantara sejak abad ke-17 yang membangun koloni-koloni di Kalimantan bagian timur, di Kalimantan bagian tenggara, Pontianak, Semenanjung Melayu, khususnya di

barat daya Johor, dan di wilayah lainnya. Dari beberapa koloni tersebut itulah, orang Bugis mengembangkan pelayaran dan perdagangan, perikanan, pertanian dan pembukaan lahan perkebunan. Demikian halnya dengan diaspora Bugis ke wilayah Tanah Bumbu di Residensi Borneo (Kalimantan) bagian Selatan dan Timur pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Walaupun berada di luar Sulawesi Selatan, orang Bugis ternyata mampu memelihara identitas ke-Bugisannya, yakni identitas *to-Ugi*.² Unsur dari identitas *to-Ugi* dalam tinjauan sejarah,

terwujud dalam terbentuknya jaringan perikanan (penangkapan ikan) *pongawa* Bugis. Kemudian jaringan perdagangan perahu layar Bugis antar pulau sejak abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Identitas *to Ugi'* di wilayah Tanah Bumbu dibentuk kaum migrant Bugis asal Wajo, Sulawesi Selatan.

Kajian tentang diaspora suku Bugis ke daerah lain yang mulai berlangsung sekitar abad ke-17 marak dikaji sejarawan dan peneliti dengan tema beragam. Umumnya mereka menitikberatkan pada tinjauan diaspora politik³. Karya-karya tersebut memang bervariasi, tetapi kajiannya cenderung hanya membahas tentang diaspora Bugis dari abad ke-17- abad ke-19. Kemudian fokusnya hanya di daerah-daerah tertentu seperti di Semenanjung Malaya, daerah pesisir Jawa dan Sumatera. Sementara itu, diaspora orang Bugis di Kalimantan bagian selatan dan timur khususnya di wilayah Tanah Bumbu, seakan 'belum tersentuh'. Selain itu pembahasan tentang pembentukan identitas budaya di daerah tujuan diaspora dan ekspansi perdagangan orang Bugis (*expansion of Bugis trade*) juga masih luput dari perhatian. Karena itu, kajian ini mencoba menguraikan diaspora orang Bugis serta terbentuknya identitas Bugis di daerah migran yaitu di wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur,⁴ tahun 1900-1942.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan utama. Pertama, apakah hubungan diaspora orang-orang Bugis dengan terbentuknya identitas *to Ugi'* ke wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur dalam kurun waktu tahun 1900-1942. Permasalahan kedua, mengapa orang-orang Bugis bisa mempertahankan nilai-nilai 'ke-Bugisannya' di tengah interaksi dengan suku-suku lainnya di wilayah

Tanah Bumbu, Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur tahun 1900-1942.

II. METODE

Kajian ini merupakan penelitian sejarah yang mengkaji perkembangan diaspora yang dilakukan oleh orang-orang Bugis ke bagian timur pulau Kalimantan. Sebagai kajian sejarah, proses penulisan artikel ini menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam metode sejarah, yang terdiri dari empat langkah utama, yaitu: pengumpulan sumber sejarah, asesmen dan kritik terhadap sumber yang ditemukan, interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam sumber sejarah, dan penulisan sejarah atau historiografi. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari koleksi Arsip Nasional khususnya untuk daerah Tanah Bumbu Kalimantan Timur dan Selatan. Selain itu, berbagai dokumen yang berupa manuskrip juga ditemukan di kalangan berbagai tokoh masyarakat Bugis di Tanah Bumbu. Demikian juga berbagai informasi juga dikumpulkan dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat Bugis di Tanah Bumbu.

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tanah Bumbu Pada Pertengahan Abad ke 19- Abad ke-20

Secara administratif, wilayah Tanah Bumbu pada awalnya merupakan daerah *landschap* berstatus *onder afdeeling* dengan nama *onder afdeeling van Tanah Boemboe* pada tahun 1844. Kemudian berubah menjadi wilayah *afdeeling* tahun 1898 bernama *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* dalam wilayah *Residentie Borneo Zuid en Oosterafdeeling* (Residensi Kalimantan

bagian Selatan dan Timur).⁵ Adapun distrik-distrik dalam wilayah Tanah Bumbu yaitu Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal, Buntar Laut, Cengal dan Sebamban.⁶

Letak geografis Afdeling Tanah Bumbu berada di antara 2°52' – 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' – 116°04' Bujur Timur.⁷ Dari catatan J.J. Hollander tahun 1864, wilayah Tanah Bumbu memiliki luas sekitar 141,5 mil persegi. Tanah Bumbu berbatasan dengan daerah Pasir di sebelah utara, di sebelah timur dengan Selat Makassar, di sebelah selatan dengan Tanah Kusan, dan sebelah barat berbatasan dengan Banjarmasin.⁸

Menurut Schwaner, wilayah Tanah Bumbu terletak di sebelah timur Pegunungan Meratus yang melintang dari utara ke selatan Kalimantan. Pegunungan Meratus terhubung dalam satu rantai pegunungan memanjang hingga ke arah barat Banjarmasin.⁹ Adapun nama-nama gunung di wilayah Tanah Bumbu pada tahun 1866 dapat dilihat pada tabel 1.

Jalur perhubungan di wilayah Tanah Bumbu selain dihubungkan lewat jalan darat, juga melalui jalur sungai. Dari segi ukurannya, sungai-sungai di wilayah ini berbeda dengan sungai lain di wilayah Kalimantan bagian selatan dan tengah yang berukuran besar. Sungai-sungai di wilayah Tanah Bumbu, berukuran kecil.¹⁰ Misalnya di daerah Pasir, terdapat sungai Kendilo, kemudian di daerah Pagatan terdapat sungai-sungai seperti Sungai Bakeranan, serta sungai lainnya di wilayah Cengal, Manunggal, Sampanahan dan Bangkalaan, Kusan dan Batulicin. Sungai-sungai ini mengalir dari arah barat ke arah timur dan bermuara di Selat Pulau Laut. Pengecualian Sungai Kendilo di daerah Pasir, yang mengalir paralel dari daerah pegunungan utara

dan selatan, kemudian alirannya berbelok ke arah timur dan bermuara ke Selat Makassar.¹¹ Adapun nama-nama sungai di Tanah Bumbu yang tercatat tahun 1866 terdapat pada tabel 2 (lampiran).

Wilayah Kalimantan Tenggara merupakan daerah perairan yang cukup ramai bagi pelayaran aktivitas sungai sekaligus juga pelayaran laut. Perairan pantai terdapat pada daerah Tanah Laut sampai Pulau Laut. Panjang perairan garis pantai itu dimulai dari daerah Maluka sampai ke daerah Pasir. Posisi wilayah Afdeeling Tanah Bumbu cukup strategis yakni terletak di pesisir, berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Jawa dan posisinya dekat dengan wilayah pulau Sulawesi. Kemudian kandungan alam-nya pun melimpah, menjadi menarik bagi orang-orang Bugis ber-diaspora ke daerah ini.¹²

Tidak salah jika Pelras berpendapat, Borneo (Kalimantan) merupakan salah satu kawasan penting di dalam sejarah migrasi orang Bugis, sejak ratusan tahun lampau. Arus perpindahan orang-orang Bugis ke pesisir timur dan tenggara Borneo ini, menurut Jacqueline Linneton dapat dikategorikan sebagai *expansion of Bugis trade*. Diaspora orang Bugis di wilayah Tanah Bumbu meliputi daerah pesisir di landschap Tanah Bumbu yakni Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Sebamban dan Pulau Laut.

B. “Embrio” Jaringan Diaspora Suku Bugis ke Tanah Bumbu, Tahun 1800-1900

Menurut K.G. Anderson, suku Bugis di wilayah Kalimantan bagian tenggara dan timur yang bermukim sejak pertengahan abad 18, berasal dari Sulawesi Selatan.

Diaspora awal Suku Bugis ke Kalimantan ini dilatarbelakangi Perang Makassar yang diakhiri perjanjian Bongaya (Cappaya Bungaya) tanggal 18 November 1667. Perjanjian ini sangat mengecewakan kerajaan sekutu Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan. Karena itulah, para bangsawan dan pengikutnya dari kerajaan kerajaan sekutu tersebut kemudian berpindah, bermukim serta mengembangkan peradaban dan persekutuan di bagian timur dan tenggara kepulauan Kalimantan.¹³ Selain itu, keberadaan suku Bugis di wilayah Kalimantan ini cukup beralasan karena suku bangsa Bugis dan Makassar memang memiliki naluri *passompe* (perantau) dan terkenal suku pengembara mengarungi samudera. Dengan perahu layar *pinisi* dan *lambo* mereka dapat mengarungi samudera Nusantara, ke barat sampai ke Madagaskar, ke timur sampai Irian/Papua dan Australia.¹⁴

1. La Ma'dukelleng: Berkelana ke Kerajaan Pasir Karena *Siri'* (1714-1736)

Dalam proses migrasi ke luar Sulawesi Selatan, biasanya para emigran Bugis dan Makassar dipimpin oleh seorang putra raja atau pangeran serta beberapa pengikutnya yang juga keturunan bangsawan. Jaringan diaspora awal Suku Bugis ke Kalimantan dirintis oleh pemuda bangsawan Wajo, La Maddukkelleng Atung Singkang/Arung Peneki. Karena perselisihan dengan beberapa bangsawan Bone, La Maddukkelleng merasa *siri'* dan memohon izin untuk merantau mencari ilmu. Sebelum menuju Kalimantan, pada tahun 1714 La Maddukkelleng berangkat dari Peneki dengan menggunakan perahu layar menuju Johor. Selanjutnya, setelah menjadi bajak laut terkenal di Johor, kembali menuju berkelana menuju wilayah Kalimantan

bagian tenggara, yaitu ke Kerajaan Pasir pada tahun 1726.¹⁵

Bersama La Maddukkelleng, ikut pula delapan orang bangsawan menengah, yaitu La Mohang Daeng Mangkona, La Pallawa Daeng Marowa, Puanna Dekke, La Siaraje, Daeng Manambung, La Manja Daeng Lebbi, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Manrappi Daeng Punggawa. Dalam perantauan ini La Maddukkelleng kawin dengan puteri Raja Pasir.¹⁶ Setelah pengembaraan La Maddukkelleng ke Pasir, banyak warga Wajo yang mengikuti jejaknya berpindah ke daerah ini. Apalagi pada tahun 1726-an, tanah Wajo telah diduduki oleh kerajaan Bone, banyak pula warga Wajo yang meninggalkan kampung kelahirannya berlayar menuju Pasir dan menetap di Sungai Muara Kendilo. Jaringan diaspora Bugis makin tersebar karena bangsawan pengikut La Maddukkelleng mulai membuka beberapa daerah baru di Kalimantan bagian timur. Contohnya adalah La Mohang Daeng Mangkona membuka daerah Kutai dan Samarinda Seberang.

2. Puanna Dekke, Pionir Pertama di Pamagatan (1735-1800)

Tidak semua pengikut La Maddukkelleng Arung Singkang mengikuti jejaknya tinggal di wilayah Kerajaan Pasir. Seperti dituliskan dalam naskah *Lontara Kapitan La Mattone*, salah seorang bangsawan menengah yakni Puanna Dekke, melanjutkan pelayaran ke wilayah selatan Kalimantan tahun 1835. Dalam catatan *Lontara La Mattone*, dalam pelayaran Puanna Dekke menyusuri daerah Tanah Bumbu sampai akhirnya menjumpai sebuah muara sungai, yaitu muara Sungai Kusan. Daerah tersebut kaya sumber daya alam yakni rotan dan bernama *Pamagatan*.¹⁷ Karena daerah ini termasuk wilayah Kerajaan Banjar, Puanna Dekke lalu menghadap Sultan Banjar

menyampaikan maksud mohon izin menempati dan bermukim di daerah tersebut.

Sultan Panembahan Batu memberikan izin namun sebagai “prasyarat” Panna Dekke sanggup menanamkan investasi untuk biaya pembangunan pemukiman baru di atas lahan hutan belantara tersebut. Puanna Dekke pun menerima dan menjamin keamanan perairan di Muara Pagatan yang selama ini sering digunakan sebagai “markas” para bajak laut.¹⁸ Kehormatan yang diberikan Panembahan dengan ijin pembukaan Tanah Pagatan, menjadi semangat bagi pembangunan pemukiman baru, sampai akhirnya menjadi sebuah Kampung. Puanna Dekke memberi nama *Kampoeng Pegattang* (dari asal kata dari tempat *pemagatan* atau pemotongan rotan), belakangan berubah nama menjadi *Pagatan*. Daerah inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal Kerajaan Bugis Pagatan di wilayah Tanah Bumbu, pada tahun 1750.

3. Perkawinan Politik Arung To Rawe dan Pembukaan Batulicin (1775-1830)

“Pelopor” diaspora Bugis di di wilayah Tanah Bumbu bukan hanya Puanna Dekke, jaringan diaspora juga dirintis oleh Arung To Rawe, bangsawan dari Tanah Wajo tahun 1775. Dalam naskah *Kitab Raja Raja Pasir* (KRRP), dijelaskan bahwa Arung To Rawe atau Andi Pasere tertarik membuka Batulicin dan Cantung karena memiliki sumber daya alam berupa rotan melimpah. Karena lokasi tersebut berada di wilayah Kerajaan Banjar, Arung To Rawe menghadap Sultan Banjar yaitu Sultan Tamjidillah I di Martapura ibukota Kesultanan Banjar. Keinginan Arung To Rawe diterima baik oleh Sultan dengan ketentuan *bagi-hasil* sesuai hukum adat di Kesultanan Banjar.

Setelah membuka wilayah Cantung dan Batulicin, Arung To Rawe lalu mengawini putri Sultan Tamjidillah I, Puteri Intan. Selanjutnya dalam naskah tertulis pada tahun 1190 Hijriyah atau 1775 Miladiyah/Masehi, lokasi areal hutan rotan yang telah sekian lama digarap oleh Andi Paasere bergelar Arung To Rawe diresmikan menjadi kerajaan tersendiri di bawah daulat kesultanan Banjar. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Sultan Tamjidillah I dengan satu upacara khusus yang diadakan di ibukota Kerajaan Banjar, Martapura. Kerajaan tersebut bernama Cantung dan Batulicin. Dalam upacara ini sekaligus menetapkan rajanya (Ratu) yang pertama adalah putri beliau sendiri (Permaisuri Arung To Rawe) diberi gelar Ratu Intan I.

C. Penetrasi Kolonial Belanda di Kerajaan Bugis Pagatan (1838-1912)

Pemerintahan Kerajaan Pagatan yang terbentuk pada pertengahan abad ke 18, berlangsung dari tahun 1761 sampai dengan tahun 1912. Pada masa pemerintahan yang berlangsung sekitar satu setengah abad ini terbagi dalam beberapa fase. Fase pembentukan kerajaan oleh Puanna Dekke dan pengangkatan La Pangewa (Kapitan Laut Pulo) sebagai raja pertama di Kerajaan Pagatan, yang diperkirakan berlangsung dari tahun 1761-1838. Kurun waktu ini ini disebut dengan periode perintisan Kerajaan Bugis Pagatan. Kemudian fase perkembangan Kerajaan Pagatan dibagi menjadi tiga periode. Pertama, adalah periode pemerintahan raja Pagatan kedua, Arung Pallewange/La Paliweng tahun 1838-1855. Penetrasi awal kolonial Belanda di Kerajaan Pagatan terjadi pada tanggal 19 Juni 1838 ketika Arung La Paliweng menandatangani perjanjian dengan

Belanda.¹⁹ Kemudian menurut Nagtegaal, pada tanggal 22 Maret 1842, pemerintah Belanda menandatangani *Acte van Verbond* dengan Arung Abdul Rahim, yang isinya bahwa kerajaan Pagatan diserahkan kepada Arung Abdul Rahim sebagai *Erfelijk Leen* atau pinjaman turun temurun. Arung Abdul Rahim mendapat gelar *Aroeng Palewan Abdoel Rachim bin Hassan*.²⁰

Selanjutnya periode perluasan wilayah kekuasaan, Kerajaan Pagatan digabung dengan kerajaan Kusan, sehingga menjadi Kerajaan Pagatan-Kusan yang berlangsung dari tahun 1861-1908. Pada periode ini, Kerajaan Pagatan di perintah Arung pagatan ketiga, yakni Arung Abdul Karim Bin Abdul Rahim pada tahun 1855-1871. Arung Abdul Karim dinobatkan menjadi raja Pagatan ketiga dengan gelar Arung La Mattunru. Pada tanggal 2 Agustus 1861, Penggabungan Kerajaan Pagatan dan Kerajaan Kusan ditandai penandatanganan *Politiek Contract* antara Arung Abdul Karim Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh *Gouverneur General* (GG) pada tanggal 7 Agustus 1862.²¹

Setelah Arung Abdul Karim meninggal dunia tahun 1871, lalu digantikan putranya Arung Abdul Djabbar La Makkaraw, Raja Pagatan keempat yang memerintah tahun 1871-1875. Arung Abdul Djabbar La Makkaraw tidak mempunyai keturunan, maka digantikan oleh keponakannya, Arung Ratu Daeng Mangkau (putri dari Arung Pallewange), yang dinobatkan pada tanggal 12 November 1875. Pada masa pemerintahan Ratu Daeng Mangkau, pemerintah Hindia Belanda kembali mengadakan perjanjian dengan penandatanganan kontrak politik (*Politiek Contract*) tanggal 13 November 1875.²²

Ratu Daeng Mangkau wafat pada tahun 1883. Sementara anaknya bernama

Abdul Rahim belum dewasa, makapemangku kerajaan dipercayakan kepada kakaknya Andi Tangkung. Selanjutnya Andi Tangkung digantikan oleh Arung Abdul Rahim, yang dinobatkan menjadi Raja Pagatan ketujuh dengan gelar kehormatan Andi Sallo. Pemerintahan Arung Abdul Rahim Andi Sallo berlangsung pada tahun 1893-1908. Pada masa pemerintahannya, Arung Abdul Rahim menandatangani kontrak *Pegatan en Koesan Suppletoir Contract* tanggal 7 Juni 1893 tentang eksplorasi bahan tambang di wilayah Kerajaan Pagatan dan Kusan.²³

Pada masa akhir kekuasaan Arung Abdul Rahim telah terjadi kemelut dalam kerajaan Pagatan Kusan. Peristiwa tersebut berawal perseteruan antara dua saudara antara Arung Abdul Rahim dan Andi Tangkung. Mencermati komplik internal ini akhirnya setahun sebelum wafatnya Arung Abdul Rahim, yakni pada tanggal, 20 April 1907, Arung Abdul Rahim mengeluarkan suatu pernyataan (*verklaring*) yakni *Verklaring Betreffende de Overdracht van het Landschap Pagatan en Koesan aan het Gouvernemen* bahwa kerajaan Pagatan dan Kusan diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda. *Verklaring* ini akan diratifikasi 11 Mei 1912. Periode berikutnya, Pagatan dan Kusan menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tahun 1912-1942. Pada periode ini, Kerajaan Pagatan telah mengalami perubahan pemerintahan, kalau sebelumnya dibawah vazal kerajaan Banjar, maka sejak 1912 diserahkan kepada Pemerintahan Hindia Belanda.²⁴

1. Kontinuitas Diaspora Bugis dan Terbentuknya Identitas *to ugi'*, Tahun 1900-1942: "Mallekke Dapureng", Gelombang Migrasi *To Ugi'* Awal Abad ke- 20

Gelombang migrasi besar-besaran keturunan Bugis yang kemudian menetap di wilayah Kalimantan bagian timur dan tenggara setelah tahun 1900 (awal abad ke-20) terjadi hampir bersamaan dengan ekspansi pemerintahan kolonial Belanda secara total atas seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Zuid Celebes) pada tahun 1906. Belanda memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke pedalaman Sulawesi Selatan, menaklukkan wilayah Bone pada tahun 1905 hingga Tana Toraja tahun 1907. Karena itulah, banyak penduduk di Sulawesi Selatan melakukan migrasi keluar daerah. Migrasi tersebut sebagian besar dilakukan oleh petani-petani Bugis, yang daerah tujuannya adalah ke Sumatera, Kalimantan dan Semenanjung Malaya.²⁵ Oleh karena ketimpangan sosial-ekonomi antara kelompok melebar, terjadilah gerak penduduk ke luar daerah, yang dalam istilah Bugis disebut *mallekke' dapureng*.²⁶ Mengenai jumlah orang-orang Bugis yang bermigrasi "mallekke' dapureng," tercatat dalam *volkstelling* 1920. Data dalam *volkstelling* tersebut menunjukkan kelompok etnik Bugis-Makassar telah tersebar hampir di seluruh kepulauan Nusantara.

Bila dibandingkan antara keempat kelompok etnik tersebut, etnik Bugis memiliki tingkat migrasi keluar yang tertinggi, yaitu sekitar 12,10 persen. Sedangkan Makassar hanya memiliki tingkat migrasi 2,50 persen. Tingkat migrasi orang Mandar bahkan lebih tinggi dibandingkan Makassar yakni 3,10 persen. Kemudian tingkat migrasi di wilayah Sulawesi Selatan sendiri lebih tinggi lagi. Suku bangsa Bugis tercatat 1.005.142 jiwa yang melakukan migrasi di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian disusul orang Makassar dengan jumlah 305.212. Sementara suku bangsa Mandar hanya tercatat 144.619

jiwa yang melakukan migrasi, sedangkan suku bangsa Toraja 144.838 jiwa.

Arus migrasi suku bangsa Bugis pada tahun 1920-an juga membawa dampak bagi perkembangan "teknologi" pembuatan perahu di wilayah Pagatan dan *landschap* Tanah Bumbu pada umumnya. Perahu yang mula-mula dikembangkan untuk perahu layar adalah perahu pejala. "Industri" pembuatan perahu ini berpusat di Kampung Pedjala ini dimulai sekitar tahun 1920-an dipimpin *pambakalaberna* La Suke.²⁷ Dari beberapa sumber tidak disebutkan bagaimana teknologi yang dipakai orang Bugis dalam membuat perahu. Hanya saja dijelaskan bahwa berdasarkan bentuknya, perahu Bugis Pagatan, Mandar, Serdangan dan Bajau dari Tanah Bumbu dapat dikelompokkan: (1) Perahu sungai berbentuk *sampang* atau sampan yang biasanya dipakai orang Bugis Pagatan di Kampoenng Serdangan, biasa disebut perahu *serdangan*; (2) Perahu pantai yang dipakai nelayan Suku Bajau yang disebut *jalukong*; (3) Bentuk sekoci yang disebut *lepa-lepa* oleh Suku Bugis Pagatan; (4) Perahu layar yang digunakan di laut.

Bentuk bentuk atau jenis perahu layar yang dipergunakan di laut, baik dalam pelayaran antar pulau atau pantai dan ada yang dapat mencapai negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia seperti perahu *Sande, Lambo, Bego, Pejala, Lete, Katir, Pinis* atau *Pinisi, Pelari* dan *Sekonyer*. Sesuai perkembangannya, ada diantara bentuk perahu di wilayah Tanah Bumbu ini yang mengalami perubahan bentuk yang tidak mendasar pada tahun 1900- sampai tahun 1950 an, karena pengaruh perkembangan zaman. Misalnya perahu *pejala* atau *katir*.²⁸

Sementara itu, faktor penarik tidak langsung bagi masuknya migran Bugis ke wilayah adalah beroperasinya Pertambangan Batubara Pulau Laut tahun 1903. Perusahaan Tambang Batubara Pulau Laut (Pulau Laut Stenkolenmijn) memerlukan tenaga kerja yang cukup besar. Seperti kondisi pada tahun 1908 kemampuan produksi maksimum tercapai. Jumlah pegawai bertambah dari 1.500 orang kuli menjadi 2.300 orang kuli pada tahun 1910. Dari catatan Rudi Nierop, tenaga kerja tersebut dibagi dalam beberapa kriteria yakni kuli kasar, tukang yang memiliki *skill*, *mandor*, *clerk* dan pengawas yang terdiri dari orang-orang Eropa.²⁹

Menurut catatan Leopold, penduduk Pulau Laut didominasi oleh suku Melayu, kemudian suku Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan. Jumlah orang Bugis pada tahun 1913 di Pulau Laut adalah 4.119 jiwa. Orang Eropa berjumlah 46 jiwa, orang Jawa 1.524 jiwa, orang Melayu 9.916 jiwa, orang Cina 780 jiwa, Orang Keling 13 jiwa, orang Arab 78 jiwa serta sisanya adalah orang Bajau yang tidak didapatkan data lengkapnya.³⁰ Walaupun jumlah orang Bugis cukup besar dan menduduki tempat kedua di Pulau Laut, orang-orang Bugis ternyata tidak berprofesi sebagai kuli di pertambangan Pulau Laut. Mereka berprofesi lain yakni sebagai pedagang perantara. Seperti yang diungkapkan Lindbland bahwa di sekitar wilayah pesisir Kalimantan Tenggara dan Pulau Laut, perantau Bugis Wajolah yang pada awalnya menjalankan bidang perdagangan.

2. Intensitas Migrasi Bugis ke Kalimantan Tahun 1920-1940

Dalam jangka waktu sepuluh satu dasawarsa yakni tahun 1920-1930, etnik Bugis-Makassar menunjukkan peningkatan intensitas migrasi ke seluruh pulau di wilayah Hindia Belanda

dalam jumlah yang lebih besar. Ini terlihat dari hasil sensus penduduk (*volkstelling*) 1930. Migrasi utama yang tercatat dalam sensus ini adalah migrasi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan, dari Jawa ke Sumatera, terutama Sumatera Timur dan Lampung, dan dari Kalimantan Selatan ke Sumatera, terutama ke Riau dan Jambi. Terdapat juga sejumlah migrasi besar dari berbagai daerah di Nusantara ke Semenanjung Malaya, terutama dari Jawa, Kalimantan Selatan, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Pulau Kecil Bawean.

Sayangnya, tidak ada pemisahan antara penduduk keturunan Bugis dan penduduk Bugis pendatang yang bermigrasi pada tahun 1930 dalam sensus penduduk 1930 tersebut. Tetapi paling tidak, dengan data itu bisa menggambarkan seberapa besar jumlah orang Bugis di wilayah pesisir tenggara Kalimantan ini. Selain itu, penduduk Bugis yang ada di wilayah Tanah Bumbu dan Pulau Laut ini pada umumnya bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir pantai. Seperti terdapat dalam data, di *gemeente* Kotabaru (ibukota *onderafdeeling* Tanah Bumbu dan Pulau Laut), hanya 220 orang Bugis yang bertempat tinggal di perkotaan sedangkan sisanya adalah di daerah kampung pada wilayah pesisir pantai.

D. Ponggawa Bugis: Eksis di Tengah Depresi Ekonomi Tahun 1930-an.

1. Perikanan, Bahuma dan Membuat Kopra: Strategi Adaptasi Ekonomi Bugis

Salah satu dampak dari migrasi Bugis ke wilayah Tanah Bumbu adalah munculnya jaringan ekonomi orang Bugis di wilayah Kalimantan bagian tenggara. Untuk melihat jaringan ekonomi orang Bugis pada tahun 1930-an tidak terlepas dari perkembangan

kondisi perekonomian di Hindia Belanda pada umumnya. Dalam kondisi resesi ekonomi, para migran Bugis dari golongan *to-maradeka* datang secara berkelompok pada tahun 1930-an ke kawasan Tanah Bumbu.

Proses pembukaan tanah dilakukan dengan meminta izin tinggal-garap pada para *pambakala* atau kepala kampung. Secara berkelompok mereka kemudian mulai menempati tempat-tempat strategis di sekitar wilayah “kampong” Pejala dan Pakkaja. Meskipun tidak sedikit diantara mereka yang langsung menetap di suatu tempat tanpa meminta izin dan baru melaporkan keberadaannya pada aparat kampung yang berwenang jika menghadapi konflik atau masalah. Tidak berbeda dengan migran yang telah menetap sebelumnya, mereka juga memulai aktivitas ekonominya dari kegiatan perikanan tangkap, dengan menjadi nelayan tradisional.³¹

Walaupun memiliki tanah yang luas, sejumlah migran Bugis diketahui enggan menjual tanah miliknya yang dianggap memiliki nilai historis tertentu. Selanjutnya mereka akan berusaha mencari tanah-tanah yang lebih “menguntungkan” dan seringkali mengikuti jejak keberhasilan orang lain (meskipun berbeda etnis). Hal ini bisa dilihat dari kemampuan adaptasi para migran Bugis di daerah Satui yang mampu mengadopsi kegiatan pertanian padi dengan sistem *handilatau bahumaya* yang dikembangkan migran Banjar maupun sistem perladangan berpindah yang dipraktekkan penduduk asli setempat (Dayak).

Para migran di wilayah Tanah Bumbu juga membuka perkebunan kelapa untuk kopra yang memiliki harga menarik di pasaran. Menurut Lenggono, para migran Bugis pioner dari Wajo yang datang ke kawasan Kalimantan menjelang tahun 1900-an, melakukan

kegiatan perdagangan, khususnya kelapa yang akan diolah menjadi kopra.³²

Linbland mengungkapkan bahwa selain tanaman karet terdapat komoditas perkebunan alternatif di wilayah Kalimantan bagian tenggara, yaitu lada dan kopra. Tanaman lada dan kopra ditanam oleh penduduk di Pulau Laut dan Pagatan. Sementara itu, komoditas karet juga tersebar di wilayah Pagatan, Selat Kutai Utara dan Sampit. Pada tahun 1930-an pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru dalam perdagangan lada dan kopra. Semua pengiriman lada dan kopra harus melewati perwakilan pemerintah di Kotabaru. Kemudian sekitar 75 persen dari komoditas tersebut dikirim ke luar negeri. Selain pasaran luar negeri, kopra juga dijual sebagai komoditas penting di kepulauan Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kopra yang diproduksi di daerah Pagatan cukup terkenal karena kopra di daerah ini merupakan produk kering yang mengalami pemrosesan terdahulu, biasanya disebut *kopra panggang*.³³

Munculnya kalangan pengusaha (pongawa) dengan pekerja atau anak buah (sawi) membentuk hubungan *patron-klien*, yang dalam masyarakat Bugis di Tanah Bumbu biasanya disebut *ajjoareng-joa'*. Pada masyarakat Bugis, *patron* biasanya diduduki oleh kalangan bangsawan yang disebut *ajjoareng* atau *Pappuangeng*. Sementara *klien* berasal dari kalangan masyarakat biasa yang disebut *joa'* atau *ana' guru* (pengikut). Hubungan *patron* dan *klien* merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Karena itu sang *patron* wajib untuk menjaga hubungan baik dengan para *klien*-nya, dan juga sebaliknya. Seperti yang dilakukan oleh La Suke, Kepala Kampong Pedjala tahun 1930-an. Sebagai golongan *ajjoareng*, La Suke membangun dukungan jaringan

klien. Cara pertama adalah dengan menunjukkan kedemawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Hal ini dilakukan dengan membangun armada penangkap ikan yang bisa menampung banyak *sawi*. La Suke juga melindungi *sawi*-nya apabila terdapat permasalahan dengan penduduk lainnya di Kampoeng Pedjala.

2. Armada Perahu Layar Bugis dan KPM: Menjaga Hubungan dengan Daerah Asal di Sulawesi Selatan.

Seiring dengan keberadaan orang-orang Bugis bermukim di pesisir timur dan tenggara Kalimantan pada tahun 1900-an, turut berkembang aspek pelayaran dan perdagangan. Selain itu muncul beberapa pelabuhan-pelabuhan laut yang melayani perdagangan antar pulau. Seperti Pelabuhan kecil di Pagatan dan Batulicin yang dikembangkan orang-orang Bugis Wajo yang ber-*diaspora* dari daerah Sulawesi Selatan.³⁴ Berawal dari *Kampoeng Pagatang* yang dibuka oleh Puanna Dekke tahun 1830, berkembang menjadi bandar kecil. Mengenai jalur perdagangan awal di wilayah Tanah Bumbu dapat ditelusuri kembali dari catatan Van der Ven, bahwa pada tahun 1846 terdapat dua kapal bermuatan rotan dan lilin yang berlayar dari Pagatan ke Singapura.³⁵ Kemudian dari catatan Van Der Stok tahun 1863, melaporkan bahwa salah satu pemasukan impor di Pulau Selayar adalah barang dari Pagatan yakni sejumlah komoditas dengan total biayanya f 405.

Perdagangan di wilayah Tanah Bumbu, umumnya dilakukan oleh perahu layar secara tradisional. Perahu layar tersebut adalah perahu *pinisi*, *pelari* maupun *sekonyer*. Jalur pelayaran dan perdagangan interinduler dari dan ke

wilayah Pagatan tersebut bisa dikategorikan sebagai jalur sepi karena sedikitnya kapal yang melewati jalur tersebut. Walaupun demikian, keberadaan pelayaran ini sudah menggambarkan bahwa hubungan antara migran Bugis dengan daerah asal di Sulawesi Selatan sudah terjaga dan berlangsung secara kontinu sejak abad ke-19.

Dalam kurun waktu tahun 1926 sampai 1936, daerah Pagatan juga menjadi salah satu rute pelayaran Roepelin dengan Surabaya sebagai pangkalan utamanya. Menurut Singgih Tri Sulistyono dan Endang Susilowati rute ke Kalimantan ini melayani pelabuhan di Kalimantan bagian timur, tenggara dan barat, seperti Banjarmasin, Kotabaru, Pagatan, Balikpapan, Samarinda dan Pontianak. Untuk rute pelayaran ini, muatan yang diangkut berbagai macam barang impor, beras, gula, botol kosong, dan besi tua. Pelayaran kembali ke Surabaya mengangkut kayu, kopra dan kelapa.³⁶ Hal utama yang menambah eksisnya jalur perdagangan perahu ini adalah armada perahu dagang. Selain itu karena yang diperdagangkan adalah komoditas sehari-hari yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kalimantan. Selain itu, dengan kondisi yang ada, kapal kecil bisa menjangkau daerah hinterland pelabuhan Pagatan seperti Batulicin, Sebampan dan daerah lainnya.

Keberadaan rute pelayaran Roepelin ini tak terlepas dari sistem perdagangan di daerah Pagatan dan Tanah Bumbu pada umumnya yang telah diintegrasikan ke dalam suatu sistem perdagangan regional dan internasional oleh dua sistem perhubungan yang menjadi satu kesatuan. Sistem perhubungan yang dimaksud adalah antara pelayaran sungai dan pelayaran laut. Menurut Bambang Subiyakto, komoditas yang semula dari

daerah perdalaman, diangkut melalui jasa pelayaran sungai menuju ke pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Sampit dan Kotawaringin (Kalimantan Tengah), Pagatan, Batulicin dan Kotabaru (Kalimantan Selatan) serta Pasir, Kutai dan Samarinda (Kalimantan Timur), maupun pelabuhan utama yaitu Banjarmasin.³⁷ Dalam hal ini keberadaan pelayaran perahu rakyat di daerah Tanah Bumbu memang memiliki dinamika yang berbeda dengan pelabuhan lainnya seperti Banjarmasin.

Selain perahu layar, beberapa kapal armada KPM yang melewati wilayah Kalimantan bagian tenggara, khususnya di onderafdeeling Tanah Bumbu, yakni Pelabuhan Kotabaru sejak tahun 1902, 1903, 1911 hingga tahun 1940-an. Selain melewati wilayah Kalimantan bagian tenggara, pelayaran KPM juga melewati Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara. Kapal kapal KPM tersebut adalah Van Hoorn, Jansens, Swardecroon, Van Heemskerkerk, Steamer Alting, Van der Lijn, GG.Daendels, Speelman, Van der Capellen, Sari Borneo, Van Der Lijn dan Houtman.³⁸ Kemudian daerah asal keberangkatan dari kapal kapal KPM tersebut adalah Surabaya, Batavia, Kumai, Bawean dan Banjarmasin. Sementara itu, jadwal keberangkatan rata-rata satu kali setiap minggu sampai dengan sekali setiap dua minggu. Data tentang pelayaran KPM tersebut menunjukkan bahwa keberadaan armada KPM berperan dalam menjaga hubungan antara orang-orang Bugis perantauan dengan daerah asalnya di Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangannya pada tahun 1930-an, peranan perahu layar seperti yang ada di Pelabuhan Pagatan, Kotabaru dan Batulicin pun berubah fungsi. Menurut Endang Susilowati, kapal layar berubah menjadi alat

transportasi pembantu atau *feeder vessels* dalam kurun waktu tersebut. Hal ini tampak dengan makin menurunnya jumlah dan kapasitas perahu yang singgah di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1920-an, dengan perkecualian pelabuhan Makassar.

Dalam hal ini, keberadaan armada perahu KPM di beberapa kasus di pelabuhan besar memang menggantikan posisi perahu rakyat. Namun tidak demikian halnya dengan pelayaran perahu di daerah Pagatan. Keberadaan perahu rakyat di Pagatan justru menjadi penyuplai komoditas perdagangan dari para pedagang pribumi seperti suplai untuk daerah Sembaban, Kusan Hulu dan Cantung. Bahkan terdapat jalur pelayaran tradisional yang berdagang hingga Samarinda dan Sulawesi bagian selatan yang merupakan jalur armada KPM.³⁹ Menurut Endang Susilowati, dalam kurun waktu yang sama, memang terdapat perahu rakyat juga melakukan pelayaran dan perdagangan ke rute yang dilalui oleh kapal KPM milik pemerintah Belanda.

Dari tahun 1929 hingga 1931 yang berlanjut hingga tahun 1942, rata-rata muatan perahu di berbagai pelabuhan di Hindia Belanda mengalami kenaikan, sedangkan muatan kapal uap menurun. Pada tahun-tahun tersebut, pelayaran kapal uap dapat dikatakan mengalami kelumpuhan karena biaya operasi yang tinggi tidak mungkin dapat tertutup dalam kondisi pasar yang sangat lesu. Perahu yang berteknologi sederhana justru tetap dapat *survive* dan bahkan menjadi andalan pedagang dalam perdagangan antarpulau. Dalam masa depresi ekonomi, jalur-jalur pelayaran utama kembali diramaikan oleh kiprah perahu layar. Dalam hubungan pelayaran antar pulau, perahu layar pribumi seperti di wilayah Pagatan dan Batulicin, memegang peranan penting. Seperti

dikemukakan Endang Susilowati, kasus pelayaran Sulawesi-Jawa, dan Jawa-Kalimantan membuktikan hal itu. KPM dan perahu pribumi sama-sama melakukan aktifitas pengangkutan pada jalur yang hampir sama, meskipun volumenya berbeda. Perbedaan ini dikarenakan karena daya tampung kapal pribumi yang relatif kecil. Selain itu Kapal KPM tidak mungkin melayari jalur sungai kecil di beberapa daerah.

E. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini maka disimpulkan dalam dua bagian. Pertama, diaspora orang-orang Bugis yang berlangsung selama dua tahap yakni pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-20, adalah faktor utama yang mendorong terbentuknya identitas *to Ugi* ke wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur dalam kurun waktu tahun 1900-1942. Hal ini disebabkan karena sifat dasar orang Bugis, walaupun berada di luar Sulawesi Selatan tetap memelihara identitas ke-Bugisannya. Selain itu karena strategi adaptasi Bugis yang selalu menyesuaikan dengan adat budaya setempat yang *multicultural*.

Dampak diaspora pada abad ke-20 ini adalah munculnya identitas Bugis yang terwujud dalam terbentuknya *kampoeng-kampoeng Boegis* di sepanjang pesisir Pagatan, Tanah Bumbu. Munculnya tradisi *Mappanretasi* dan migrasi musiman *nelayan Pegatang* atau *Pappagatang* pada tahun 1920-1930-an. Kemudian terdapat “industri” pembuatan perahu di Kampung Pedjala, Pagatan tahun 1912. Dalam kurun waktu tahun 1930, keberadaan Ponggawa (pengusaha ikan) Bugis turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi di Tanah

Bumbu di tengah depresi ekonomi tahun 1930-an. Usaha perikanan ini dibangun oleh orang Bugis yang berasal dari strata sosial “*to-maradeka*” (orang merdeka) dan “*anakarung*” (bangsawan/elit tradisional). Karena faktor depresi ekonomi tahun 1930, orang Bugis di Pagatan juga mengembangkan sistem pertanian *bahuma* dan membuat kopra yang juga menjadi bagian dari strategi adaptasi ekonomi Bugis. Keberadaan *pongawa* (pengusaha ikan) dan *sawi* (pekerja/buruh perikanan) dalam jaringan ekonomi ini, menciptakan hubungan *patron-klien* atau biasanya disebut *ajjoareng-joa*. Sayangnya hubungan patron klien ini mulai pudar pada tahun 1930-an.

Kedua, orang-orang Bugis bisa mempertahankan nilai nilai ‘ke-Bugisannya’ di tengah interaksi dengan suku-suku lainnya di wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur tahun 1900-1942 disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah, nilai nilai ke-Bugisan yang terwujud dalam identitas *to-ugi* dibentuk oleh perantau Bugis Wajo ini yang memang memiliki karakter “ke-Bugisan” yang kental dibandingkan sub suku Bugis lainnya. Kemudian faktor yang kedua adalah ‘hegemoni’ kerajaan Bugis Pagatan, yang telah terbentuk sejak tahun 1750-an. Kerajaan Bugis di wilayah/landschap Tanah Bumbu ini dalam perkembangannya hingga abad ke-20, kerajaan ini menjadi “homebase” pedagang Bugis yang merantau di Kalimantan bagian tenggara dan timur. Karena adanya kumpulan masyarakat yang bergaul dalam satu wilayah ini, sehingga identitas suku tetap terjaga.

CATATAN

¹ Lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Diaspora dan Proses Formasi ‘Keindonesiaan’: Sebuah Pengantar Diskusi” (Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011), hlm.8; lihat juga Jana Evans Braziel & Anita Mannur, “Nation, Migration and Globalization: Point of Contention in Diaspora Studies”, dalam Jana Evans Braziel & Anita Mannur (ed), *Theorizing Diaspora* (Germany: Blackwel Publishing, 2003), hlm.1.

² Istilah *to ugi*’ berasal dari Bahasa Bugis yakni *to*: orang, *Ugi*’; Bugis, sehingga *to Ugi*’ bisa diartikan dengan *orang Bugis*.Istilah ini juga biasanya dipakai orang Bugis sendiri untuk mengidentifikasi dirinya di tanah rantau sehingga merasa berbeda dengan suku lainnya.

³ Diantara karya tersebut adalah Jacqueline Linneton, “Passompe’ Ugi’: Bugis Migrants and Wanderers”, *Archipel*, vol. 10, 1973; Kathryn Gray Anderson, “The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora” (Disertasi Pada University of Hawaii, Agustus 2003); Leonard Y. Andaya, “The Bugis Makassar Diasporas”, *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* (JMBRAS), vol. 68, part I.

⁴ Penulisan Residensi Borneo bagian Selatan dan Timur merujuk pada wilayah administratif, sedangkan wilayah Tanah Bumbu merujuk pada daerah *landschap* atau bentang alam. Lihat M. Idwar Saleh, *et.al.*, *Sejarah Daerah Tematis, Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat, 1977/1978), hlm. 9.

⁵ M.Suriansyah Ideham, *et.al.* (ed), *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 233; *Staatsblad van Nederlandisch Indie Voor Het Jaar 1849* (Batavia: Ter Lands Drukkerij, 1849), hlm.1-2.

⁶ Lihat “Het Eiland Borneo en Zijne Bewoners”, dalam J.B.J. van Dooren, *Bijragen tot de Kennis van Verschillende Overzeesche Landen, Volken, enz*, Eesrste Deel (Amsterdam: J.D.Sybrandi, 1860), hlm. 241; “De Minister van Staat, Gouverneur Generaal van Nederlandsc Indie”, dalam L.J.A. Tollens, *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven, enz, Over de Jaren 1808-1856*, Tweede Deel (Batavia: Lange & Co, 1856), hlm.160.

⁷ ⁷“Kabupaten Tanah Bumbu” (online) (http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Bumbu, diku-njungi 22 Mei 2011).

⁸ J.J. Hollander, *Borneo’s Zuider en Ooster Afdeling* (Handleiding bij de Beoefening der Land en Volkenkunde Van Nederlansch Oost Indie, Koninklijke Militaire Akademie,1864), hlm.143. Wilayah Afdeeling Tanah Bumbu sejak tahun 2002 menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, memiliki luas 5.066,96 km persegi (506.696 hektar), lihat BPS Kabupaten Tanah Bumbu, *Tanah Bumbu Dalam Angka 2009* (Batulicin:BPS Tanah Bumbu, 2009), hlm.2.

⁹ Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, “Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe”*Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm. 346-347.

¹⁰ Lihat catatan Residen Zuid en Oosterafdeeling van Borneo, J.G.A. Gallois, "Korte Aanteekeningen Gehouden Gedurende eene Reis langs de Oostkust van Borneo verrigt op last van het Nederlansch Indisch Gouvernement", *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsh Indie*, Vierde deel (Amsterdam: Frederik Muller, 1856), hlm.261.

¹¹ Theodore Posewitz, *Borneo:Geologi and Mineral Resources* (London: Edward Stanford, 1892), hlm. 136-137.

¹² Bambang Subiyakto, "Perompakan: Sebuah Realitas Historis Abad Ke-19 di Kal-Sel" dalam Ersis W. Abbas (ed), *Buku Kenangan Purna Tugas Prof. M.P. Lambut* (Banjarmasin: LPKPK, & DPRD kota Banjarmasin, 2003), hlm. 93.

¹³ Lihat Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora" (Disertasi pada University of Hawaii, Agustus 2003), hlm.152-160.

¹⁴ Gene Ammarel, "Bugis Migration and Modes to Adaptation in Local Situation", *Ethnology*, vol.41, no. 1, 2002, hlm.75.

¹⁵ Naskah "Lontara Sukku'na Wajo (LSW)", hlm. 2, lihat juga J. Noorduynd, "Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 1953), hlm.144-152.

¹⁶ Naskah Lontara Sukku'na Wajo (LSW)", hlm.3, lihat juga AS Assegaff, *Sejarah Kerajaan Sadurangas Atau Kesultanan Pasir* (Tanah Grogot: Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir, 1982), hlm.123-136.

¹⁷ Dalam Bahasa Banjar, kata *Pamagatan* berarti tempat pembersihan dan pemotongan rotan. Nama inilah yang kemudian berkembang menjadi nama *Pagatan*.

¹⁸ Naskah "Lontara Kapitan La Mattone", hlm.2.

¹⁹ K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.160.

²⁰ AM Noor, "Sedjarah Tanah Air Kalimantan (Toeroenan Radja Radja Tanah Boemboe)", *Madjallah Mandau*, November 1930, hlm.92,lihat juga ANRI, *Ikhtisar Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973), hlm. xc.

²¹ Lihat AM Noor, *op.cit.*, hlm 65.

²² *Ibid*,ANRI, "Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten General Zitting 1898-1899. (166.no.32)", bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling*(BZO), No. 122.

²³ ANRI, Arsip "Pagatan en Koesan Suppletoir Contract", bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling*(BZO), No. 122. Lihat juga ANRI, "Pagatan en Koesan, Nota van Toelichtin", bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling*(BZO), No. 122. ANRI, "Boeloengan, Goenoeng Taboer, Sambalioeng, Kota Waringin, Pasir, Pagatan en Koesan, Nota van Toelichting", dalam *Overeenkomsten niet inlandsche vorsten in den Oost-liidischen Archipel* (169.12), bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling*(BZO), No. 122.

²⁴ AM Noor, *op.cit.*, hlm 65.

²⁵ H.J. Friedericy, "De standen bij de Boeginezen", "De standen bij de Boeginezen en Makassaren", *Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de Internationale Koloniale, Bijdrage voor Koninklijk Instituut (BKI) 90*, (Gravenhage: Martinus Nijhoff ,1933), hlm.448-450;

Lihat juga Muhammad Idrus Abustam, “Gerak Penduduk Pembangunan Dan Perubahan Sosial Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah Di Sulawesi Selatan” (Tesis Pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1983), hlm. 251.

²⁶ Jacqueline Linneton, “Passompe’ Ugi’: Bugis Migrants and Wanderers”, dalam *Archipel*, volume.10, 1973, hlm.173. Menurut Linneton, *Mallekke’ Dapureng* dalam bahasa Bugis berarti *berpindah dapur*. Kata ini adalah ungkapan bagi gerak/perpindahan kaum atau kerabat besar secara bersama-sama dari Sulawesi Selatan ke daerah atau negeri lain. Pola gerak penduduk dapat disamakan dengan migrasi menetap.

²⁷ Syarifuddin, *Perahu Bugis Pagatan* (Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mngkurat, Provinsi Kalimantan Selatan, 1992), hlm.30.

²⁸*Ibid*, lihat juga Masrury, *et.al*, *Pinisi, Perahu Khas Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1995), hlm10-20.

²⁹*Ibid*, lihat juga Masrury, *et.al*, *Pinisi, Perahu Khas Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1995), hlm10-20.

³⁰Lihat L. Leopold, *De Gezondheidstoestand Der Arbeiders Bij De Steenkolenmijnen Van Poeloe Laoet* (Amsterdam: Ellerman, Series Vereeniging Koloniaal Instituut, Afdeeling Tropische Hygiene, 1915), hlm. 1-5.

³¹*Ibid*, hlm.121. Lihat juga Andi Nuralang, “Jejak Komunitas Bugis Makassar, Suatu Indikasi Adaptasi Lingkungan: Tinjauan Sejarah dan Arkeologi” (Tulisan tidak diterbitkan koleksi Balai Arkeologi Banjarmasin, 2007), hlm.11.

³²Mengenai pola pertanian orang Bugis sejak tahun 1930-an, lihat Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi Di Indonesia*, terjemahan Sri Ambar Wahyuni Prayoga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm.165.

³³J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch, The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942* (Leiden: KITLV, 1988), hlm.179.

³⁴Lihat Solomon Muller, *op.cit.*, hlm. 301.

³⁵Lihat Edward. L Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 144.

³⁶Singgih Tri Sulistiyono, “The Java Sea Network: Pattern in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration In Indonesia 1870s-1970s”, (Disertasi Pada Universitas Leiden, 2003, sudah diterbitkan), hlm.173; Endang Susilowati, “Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin, Tahun 1880-1990” (Disertasi pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm.160.

³⁷Bambang Subiyakto, *Perdagangan Borneo Tenggara Tempo doeloe, dalam Jurnal Kebudayaan Kandil, Melintas Tradisi*, bertema *Perdagangan di Tanah Banjar*, Edisi 15 Tahun V, November-Desember 2007, hal.59.

³⁸Data dari dari halaman iklan Koran *The Straits Times* dan *Weekly Sun* tahun 1901-1911, terbitan Singapura. Halaman iklan *didownload* dari kumpulan microfilm Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942), “The Straits Times, Weekly Sun tahun 1901-1911” (online),

(<http://newspapers.nl.sg/Digitised/SearchResults.aspx?keyword=kotabaroe>, dikunjungi 11 Mei 2012). Lihat juga Sutrisno Kutoyo & Sri Sutjiatiningsih, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 52-53.

³⁹Wawancara Usman Lundrung, Anggota Lembaga Ade Ugi' Pagatan, Jl.Panca Nenung, RT.3, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 23 Maret 2012.